

**ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PERJANJIAN TERAPEUTIK**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

R.ADRIANTO SATRIO UTOMO

C100110228

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PERJANJIAN TERAPEUTIK**

PUBLIKASI ILMIAH

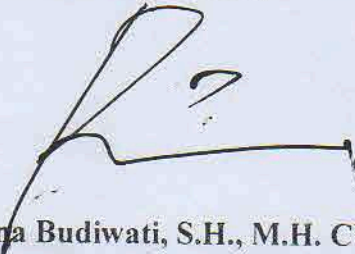
Oleh:

R.ADRIANTO SATRIO UTOMO

C 100 110 228

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Septarina Budiwati, S.H., M.H. CN)

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PENJUALAN KONSINYASI
ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PERJANJIAN TERAPEUTIK

Oleh:

R.ADRIANTO SATRIO UTOMO

C 100 110 228

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari: Selasa 12 November 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Septarina Budiwati, S.H., M.H. CN**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Darsono, S.H., M.H**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Dr. Rizka, S.Ag., M.H**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Naskah Publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 November 2019

Penulis



R.ADRIANTO SATRIO UTOMO

C 100 110 228

TINJAUAN HUKUM PELAKSANNAN PENJUALAN KONSINYASI ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN TERAPEUTIK

Abstrak

Kasus penipuan emas yang dilakukan CV. Kebun Emas dilakukan dengan beberapa tahapan hukum acara pidana yaitu berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHP. Saksi melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian bahwa dirinya ditipu dengan investasi emas dengan modus yang mereka lakukan ialah terus mencari nasabah baru melalui seminar-seminar. Dana investasi dari nasabah baru digunakan untuk memberikan bunga kepada nasabah lama, sistemnya gali lubang tutup lubang, lama-lama macet. Polisi berhasil mengungkap kasus tersebut setelah ada laporan korban para nasabah yang telah menyetorkan uangnya kepada pelaku, dan dijanjikan akan dikembalikan pada enam bulan ke depan. Polres Surakarta dalam memelihara keamanan adalah hal yang harus ada demi terciptanya keamanan di lingkungan masyarakat. (1) Polres Surakarta belum mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Surakarta. (2) Perlengkapan dan peralatan yang dimiliki Polres Surakarta belum cukup untuk menjaga keamanan di Surakarta. (3) Terbatasnya Jumlah Petugas Kepolisian Polres Surakarta. Delik yang dirumuskan secara materiil atau delik yang dikualifisir akibatnya perlu dicari hubungan kausal antara fakta-fakta yang telah dikumpulkan dengan akibat yang terjadi. Jika dalam perkara tersebut tidak ada hubungan kausal, maka hakim harus. Islam adalah agama yang pro-investasi, karena di dalam ajaran Islam sumber daya (harta) yang ada tidak hanya disimpan tetapi harus diproduktifkan, sehingga bisa memberikan manfaat kepada umat. Hal ini berdasarkan firman Allah swt.: *“Supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian”*. (QS. al-Hasyr [59]: 7). Oleh sebab itu dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Selain itu, karena investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi (muamalah māliyah), sehingga berlaku kaidah fikih, muamalah, yaitu “pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000).

Kata Kunci: Investasi, Tindak Pidana Penipuan, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan

Abstract

Gold fraud case committed by CV. Golden Gardens is carried out with several stages of criminal procedural law based on Article 184 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The witness reported to the Police that he was cheated by investing in gold with the mode that they did was to continue to look for new customers through seminars. Investment funds from new customers are used to provide interest to old customers, the system is digging a manhole cover, long stuck. The police succeeded in uncovering the case after there were

reports of victims of the nabasah who had deposited the money to the perpetrators, and were promised to be returned in the next six months. Surakarta Police in maintaining security is something that must exist for the creation of security in the community. (1) Surakarta Police have not been able to increase the legal awareness of the people of Surakarta. (2) Equipment and equipment owned by Surakarta Police Station are not enough to maintain security in Surakarta. (3) Limited Number of Surakarta Police Officers. The offense that is formulated materially or the offense that qualifies as a result needs to be sought a causal relationship between the facts that have been collected and the consequences that occur. If there is no causal relationship in the case, the judge must. Islam is a pro-investment religion, because in Islam the existing resources (assets) are not only stored but must be productive, so they can provide benefits to the people. This is based on the word of Allah Almighty. : "So that treasure does not circulate among rich people only among you". (Surat al-Hasyr [59]: 7). Therefore the basis of economic activity including investment is the Qur'an and the hadith of the Holy Prophet. In addition, because investment is part of economic activity (muamalah māliyah), so the principles of fiqh apply, muamalah, that is, "basically all forms of muamalah including economic activity are permissible unless there is an argument which forbids it." (MUI DSN Fatwa No. 07 / DSN-MUI / IV / 2000).

Keywords: Investment, Fraud, Fraud Criminal Settlement Process

1. PENDAHULUAN

Era globalisasi identik dengan kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang sangat pesat dan cepat. Fenomena ini terjadi di seluruh belahan dunia tanpa memandang negara maju maupun negara berkembang. Sebagai masyarakat dunia suatu negara dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi ini, agar dapat bersaing di persaingan dunia global yang semakin modern, praktis dan efisien. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat global, hal ini mempunyai dampak penting bagi perubahan di masa kini maupun masa mendatang. Setidaknya ada dua hal yang membuat perkembangan iptek dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan suatu negara di dunia. Pertama teknologi informasi membuat peningkatan permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri. Kedua, adalah mempermudah aktifitas masyarakat global salah satunya di

dalam transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.¹

Penipuan yang berkedok investasi emas ini terjadi di Solo pada tahun 2017. Puluhan nasabah menjadi korban dan jumlah kerugian diperkirakan hingga miliaran rupiah. Pelaku tindak pidana penipuan tersebut adalah Dina Yuanita (40) dan Djody Wisnubroto (45). Keduanya terjatuh ke dalam perangkap investasi emas. Kedua tersangka tersebut mendirikan CV Kebun Emas Indonesia untuk menjaring korban. CV tersebut mencari korban dengan cara menggelar acara seminar bertajuk investasi.²

Kapolresta Kota Solo AKBP Ribut Hari Wibowo menjelaskan, korban dibujuk untuk berinvestasi dan dijanjikan akan mendapatkan untung 5 persen setiap bulannya. Uang yang diterima tersangka Dina dari nasabah ternyata tidak digunakan untuk bisnis jual beli emas, namun untuk *trading*. Dan hasil *trading* kalah, uang nasabah habis. Terdapat sekitar 61 nasabah yang tercatat di dalam daftar CV Kebun Emas Indonesia tersebut. Dari 61 nasabah yang ada di daftar nasabah, kerugian bisa mencapai Rp 2 miliar. Dari pemeriksaan sementara terhadap kedua tersangka, pelaku beraksi di Solo dan kota sekitarnya. Kapolresta juga menduga adanya indikasi modus pencucian uang yang dilakukan kedua tersangka.³

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada *financial assets* dan investasi pada *real assets*. Investasi pada *financial assets* dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang, dan lainnya. Atau yang dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi, dan lainnya. Sedangkan investasi pada *real assets* diwujudkan dalam bentuk pembelian *asset* produktif, pendirian

¹ Rizki Dwi Prasetyo, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia," *Jurnal Artikel Ilmiah*, (2014), Fakultas Hukum: Universitas Brawijaya, hlm. 1

² Kompas.com, Kamis 6 Juli 2017 15:20 WIB, *Polisi Solo Bongkar Penipuan Berkedok Investasi Emas, 2 Orang Ditahan*, dalam <http://www.kompas.com>, diunduh Rabu, 11 Oktober 2017, pukul 10:10

³ *Ibid.*

pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya.⁴ Dalam kasus tersebut, pelaku penipuan hanya berdalih melakukan investasi emas untuk mencari korban dan tidak melakukannya dan malah menggunakannya untuk trading.

Sebagai salah satu bentuk tindak pidana, penipuan merupakan wujud tindakan yang berunsur rangkaian kebohongan untuk keuntungan diri pelaku, yang berakibat orang yang dibohongi, menjadi dirugikan. Kerugian ini terkait dengan telah memberikan atau menyerahkannya orang lain tersebut atas sesuatu kepada pelaku penipuan. Salah satu tujuan dari para pelaku tindak pidana adalah memperoleh benda atau uang sebagai hasil kejahatan yang mereka inginkan. Tingginya kebutuhan hidup yang semakin hari semakin berkembang dan semakin sulit untuk pemenuhannya membuat para pelaku tindak pidana terdorong untuk melakukan tindak pidana untuk memperoleh uang dengan cepat meskipun tindakan mereka tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Penyebaran berita bohong dan penyesatan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri atau paling tidak untuk merugikan orang lain atau bahkan dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain secara sekaligus. Dengan motivasi-motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan penyesatan dapat dikategorikan sebagai penipuan.⁶

Para pelaku diancam pidana dengan Pasal 378 KUHP. Menurut Pasal 378 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan

⁴ Abdul Hakim, 2003, *Analisis Investasi*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, hlm. 2

⁵ Widodo Arrys Setianto dan Sri Endah W., "Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong (Studi Kasus Pidana Penipuan dengan Menggunakan Cek Kosong di Pengadilan Negeri Semarang)," *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No.2, (Juni, 2017), hlm. 332

⁶ Melisa M, "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online," *Jurnal Lex Crimen*, Vol.II. No.4, (Agustus, 2013), hlm. 106

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena tindak penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:⁷

- 1) Unsur subjektif :
 - a. Dengan maksud atau *met het oogmerk* dalam hal ini beritikad buruk;
 - b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi kebutuhan masyarakat;
 - c. Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* dalam hal ini dengan perbuatan yang menentang undang undang atau tanpa izin pemilik yang bersangkutan.
- 2) Unsur-unsur objektif :
 - a. Barangsiapa dalam hal ini pelaku;
 - b. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut :
 - 1) Menyerahkan suatu benda ;
 - 2) Mengadakan suatu perikatan utang;
 - 3) Meniadakan suatu piutang .
 - c. Dengan memakai :
 - 1) sebuah nama palsu;
 - 2) kedudukan palsu ;
 - 3) tipu muslihat ; atau
 - 4) rangkaian kata-kata bohong.
 - 5)

Kedua tersangka akan dikenai Pasal 378 dan Pasal 372 Jo. Pasal 64 KUHP dan Pasal 3 dan 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan atau Pemberantasan TPPU. Kasus tersebut masih ditangani di Polresta Surakarta. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengkaji penegakan hukum yang dilakukan kepolisian terhadap tindak pidana penipuan emas di Surakarta mengingat korban yang dirugikan dalam kasus ini mencapai puluhan orang dan menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Emas di Surakarta (Studi Kasus di Polresta Surakarta)”**.

⁷ PAF Lamintang, 1997, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 142

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: a) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penipuan investasi emas di Surakarta?; b) Apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana investasi emas di Polresta Surakarta?; c) Bagaimana penipuan investasi emas ditinjau dari hukum Islam?

2. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris yakni penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan pustaka dan data primer yang merupakan hasil penelitian di lapangan. Penelitian ini mengacu pada peraturan-peraturan tertulis tentang tindak pidana investasi emas untuk kemudian dikaji penerapan atau implementasi di lapangan. Penelitian yuridis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*).⁸ Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Peneliti menggambarkan berupa hasil dari permasalahan yang diteliti.⁹ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan praktik penegakan hukum tindak pidana penipuan investasi emas di Surakarta termasuk kendala dalam proses penegakan hukum yang dilakukan dan penipuan investasi emas ditinjau dari kajian hukum Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Investasi Emas Di Surakarta

Kasus penipuan emas yang dilakukan CV. Kebun Emas dilakukan dengan beberapa tahapan hukum acara pidana yaitu berdasarkan Pasal 184 ayat (1)

⁸ Sugianto Darmadi, 1998, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Bandung: Bandar Maju, hlm. 66

⁹ Suratman dan Philips, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm. 47

KUHAP, Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri". Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Sedangkan pengertian umum keterangan saksi ada dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu". Dalam hal ini saksi melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian bahwa dirinya ditipu dengan investasi emas dengan modus yang mereka lakukan ialah terus mencari nasabah baru melalui seminar-seminar. Dana investasi dari nasabah baru digunakan untuk memberikan bunga kepada nasabah lama, sistemnya gali lubang tutup lubang, lama-lama macet. Nilai investasi masing-masing nasabah berbeda, minimal Rp 5-10 juta. Namun dua nasabah yang telah melapor mengaku menginvestasikan uangnya dengan total Rp 320 juta. Dari tersangka, polisi menyita 19 buah emas batangan 1 gram, sebuah emas batangan 10 gram, brosur dan VCD untuk bahan promosi dan surat-surat izin usaha.

Surat yang dimaksud pada Pasal 187 KUHAP adalah surat-surat yang dibuat oleh pejabat resmi yang berbentuk berita acara, akte, surat keterangan atau surat lain yang mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diadili. Syarat mutlak dalam menentukan suatu surat dikategorikan sebagai suatu alat bukti yang sah ialah bahwa surat-surat itu harus dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

Barang bukti berupa surat yang ditahan oleh pihak Kepolisian diantaranya empat lembar *Letter Of Contract Profit Sharing Gold (LOC)*, dua lembar kuitansi bermaterai, satu lembar pendirian akta CV Kebun Emas Indonesia, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), daftar nasabah, buku tabungan BCA,

Berkas kasus penipuan dan penggelapan uang investasi dengan tersangka pasangan suami istri, Djody Wisnubroto (39) dan Dina Yuanita (37), dikembalikan ke penyidik kepolisian karena dinilai kurang sempurna. Sebelumnya berkas perkara tersebut telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), karena dalam BAP belum dilengkapi dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Bisnis investasi emas dijalani pasutri tersebut berlangsung sejak 2014 hingga 2015. Selama dua tahun tersebut, diyakini sudah puluhan orang yang menjadi korban. Ada lima korban yang telah melapor secara resmi ke Polresta sekitar pertengahan 2017. Lima orang yang menjadi korban, salah satunya mengalami kerugian hingga Rp 230 juta. Lima korban yang resmi melapor, di antaranya Budy Sartono (54) warga Malang, Jatim, dan Herman Priyono (54) warga Kampung Purwoprajan RT04 RW30, Jebres, Solo. Ketika menjalani pemeriksaan di lobby Satreskrim, Dina Yuanita enggan menjelaskan perkara yang menjeratnya bersama suaminya. Ketika ditanya soal usahanya fiktif atau resmi, dan uang hasil penipuan dipakai untuk apa, dia tidak bersedia mengungkapkan sembari menundukkan kepala.

3.2 Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Investasi Emas Di Polresta Surakarta

Polisi berhasil mengungkap kasus tersebut setelah ada laporan korban para nabasah yang telah menyetorkan uangnya kepada pelaku, dan dijanjikan akan dikembalikan pada enam bulan ke depan. Namun, dalam batas waktu yang telah ditentukan uang milik korban tidak kunjung dikembalikan. Korban merasa tertipu kemudian melaporkannya kejadian ini. Polisi melakukan penyelidikan ke CV Kebun Emas Indonesia. Satu korban nasabah mengalami kerugian senilai Rp 250 juta.

Saat ini kasus pencurian dan perjudian di Surakarta secara garis besar sudah berkurang, namun dalam memberantas pencurian dan perjudian pihak Polres Surakarta masih sering mendapatkan beberapa hambatan dan belum mampu memberantasnya. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Polres Surakarta dalam melaksanakan penegakan hukum secara preventif terhadap kasus pencurian dan perjudian, (1) Polres Surakarta belum mampu mengajak

masyarakat Surakarta dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Masyarakat di kecamatan Surakarta masih banyak yang beranggapan bahwa keamanan hanyalah tanggung jawab dari pihak kepolisian saja, padahal keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab dari seluruh masyarakat dengan porsinya masing-masing. Peran serta masyarakat dalam membantu pihak Polres Surakarta dalam memelihara keamanan adalah hal yang harus ada demi terciptanya keamanan di lingkungan masyarakat. (2) Polres Surakarta belum mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Surakarta. Masyarakat masih banyak yang berani melakukan perjudian secara sembunyi-sembunyi. Pengawasan dan pengaktifan kegiatan siskamling juga belum maksimal karena Polres Surakarta belum mampu membangun kesadaran warga Surakarta dalam menjaga keamanan Surakarta. Hal ini terutama berkaitan dengan adanya tindak pidana pencurian. (3) Perlengkapan dan peralatan yang dimiliki Polres Surakarta belum cukup untuk menjaga keamanan di Surakarta. Patroli yang dilakukan oleh Polres Surakarta tidak berjalan maksimal. Hal itu karena adanya keterbatasan peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh Polres Surakarta. (4) Terbatasnya Jumlah Petugas Kepolisian Polres Surakarta. Minimnya jumlah anggota yang ditugaskan di Polres Surakarta maka dapat mengganggu beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak kepolisian.

Delik yang dirumuskan secara materiil atau delik yang dikualifisir akibatnya perlu dicari hubungan kausal antara fakta-fakta yang telah dikumpulkan dengan akibat yang terjadi. Jika dalam perkara tersebut tidak ada hubungan kausal, maka hakim harus memutus bebas.

Perkara tindak pidana pencurian dan pencucian uang yang dilakukan CV. Kebun Emas sampai ditangani oleh kepolisian dapat dikarenakan adanya laporan, pengaduan atau tertangkap tangan. Dalam hal laporan atau pengaduan, pihak pelapor atau pengadu datang ke kantor polisi untuk melaporkan atau memberikan keterangan tentang sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana. Laporan merupakan hak dan kewajiban seseorang untuk memberikan keterangan tentang sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana (Pasal 1 angka 24 KUHP), berbeda halnya dengan pengaduan. Untuk pengaduan di samping

merupakan hak dan kewajiban masih disertai dengan suatu permintaan tertentu (lihat Pasal 1 angka 25 KUHP).

Tindak lanjut yang pertama dari laporan polisi adalah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor. Pemeriksaan terhadap pelapor di sini tidak meliputi pemeriksaan terhadap kuasa pelapor, karena kuasa pelapor tidak dapat diklasifikasikan sebagai saksi. Atas dasar laporan polisi dan telah dilakukannya pemeriksaan terhadap pelapor tersebut apakah tindakan kepolisian selanjutnya, melakukan penyelidikan atau penyidikan. Dari pengamatan saya setelah polisi menerima laporan dan juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor kebiasaan yang dilakukan kepolisian dengan segera membuat Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).

Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa dengan laporan (LP) dan pemeriksaan terhadap pelapor tersebut polisi sudah menduga bahwa peristiwa tersebut adalah perbuatan pidana (bandingkan antara pengertian penyelidikan dan penyidikan). Polisi berpendapat bahwa laporan (LP) dan hasil pemeriksaan pelapor (IBAP Saksi Pelapor) sudah merupakan bukti permulaan yang cukup. Jika semua aparat kepolisian mempunyai pendapat seperti itu menurut pendapat saya adalah kurang tepat.

3.3 Penipuan Investasi Emas Ditinjau Dari Hukum Islam

Sebenarnya dalam Islam telah diatur sedemikian rupa tentang investasi yang di dalamnya jelas mengharamkan adanya unsur penipuan. Islam adalah agama yang pro-investasi, karena di dalam ajaran Islam sumber daya (harta) yang ada tidak hanya disimpan tetapi harus diproduktifkan, sehingga bisa memberikan manfaat kepada umat. Hal ini berdasarkan firman Allah swt.: *“Supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian”*. (QS. al-Hasyr [59]: 7).

Oleh sebab itu dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Selain itu, karena investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi (muamalah mālīyah), sehingga berlaku kaidah fikih, muamalah, yaitu “pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000).

Dasar hukum Al-Quran dan Al Hadist yang mengatur mengenai investasi secara umum adalah sebagai berikut:

Qs. Al-Baqarah [2]: 268

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Ayat ini secara implisit memberikan informasi akan pentingnya berinvestasi, dimana ayat itu menyampaikan betapa beruntungnya orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Orang yang kaya secara *financial* (keuangan) kemudian menginfakkan hartanya untuk pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu melalui usaha produktif, maka sesungguhnya dia sudah menolong ribuan, bahkan ratusan ribu orang miskin untuk berproduktif ke arah yang lebih baik lagi.

Kasus penipuan yang dilakukan oleh CV. Kebun Emas dengan modus yang mereka lakukan ialah terus mencari nasabah baru melalui seminar-seminar. Dana investasi dari nasabah baru digunakan untuk memberikan bunga kepada nasabah lama, sistemnya gali lubang tutup lubang, lama-lama macet. Nilai investasi masing-masing nasabah berbeda, minimal Rp 5-10 juta merupakan sesuatu yang diharamkan atau dilarang oleh Agama Islam.

Inestasi emas yang dilakukan oleh CV. Kebun Emas dengan merugikan konsumen menurut Ibnu Rusyd mengklasifikasi bahwa ada dua faktor penyebab rusaknya akad jual beli. Pertama adalah karena faktor *dzatiah* (internal) jual beli. Faktor ini disebut juga sebagai sumber pokok rusaknya akad. Setidaknya ada empat hal yang masuk unsur ini, yaitu: ¹⁰

- a. karena status haramnya barang yang dijual,
- b. adanya unsur *gharar* (penipuan),
- c. adanya unsur riba,
- d. dan/atau barang yang dijual dihasilkan melalui turunannya riba.

¹⁰ Abu Al Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*, Surabaya: Al-Hidayah, tt.: 2/111

Faktor kedua adalah karena unsur luar (*amrun kharijy*; faktor eksternal) yang ikut terlibat di dalam akad antara lain:

- a. karena adanya unsur kecurangan (*ghabn*), seperti tidak bisanya melihat barang yang dijual (*al-ghasy*) karena ada penghalang antara barang dengan pembeli,
- b. adanya unsur membahayakan (*dlarar*),
- c. karena keharaman melakukan jual beli itu sendiri,
- d. karena tempat dan waktu melaksanakan jual beli lebih penting dibanding jual beli itu sendiri.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Investasi Emas Di Surakarta

Kasus penipuan yang dilakukan CV. Kebun Emas dimana saksi melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian bahwa dirinya ditipu dengan investasi emas dengan modus yang mereka lakukan ialah terus mencari nasabah baru melalui seminar-seminar. Berkas kasus penipuan dan penggelapan uang investasi dengan tersangka pasangan suami istri, Djody Wisnubroto (39) dan Dina Yuanita (37), dikembalikan ke penyidik kepolisian karena dinilai kurang sempurna. Sebelumnya berkas perkara tersebut telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), karena dalam BAP belum dilengkapi dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Proses penyelidikan dan penyidik penting untuk dijelaskan karena dalam pemeriksaan suatu perkara proses inilah yang mengawali sebelum masuk ke tahap persidangan. Dalam KUHAP, pengertian penyelidikan dan penyidikan dibedakan sebagai tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam tindak pidana. Tahap paling awal dalam penyelesaian sebuah perkara adalah penyelidikan dimana berdasarkan pasal 1 butir 5 KUHAP penyelidikan didefinisikan sebagai berikut: "*Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan atau penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini*". Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa proses penyelidikan

sebagai upaya penyelidikan atau inisiatif penyelidikan dalam menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan ini dilaksanakan oleh Penyelidik yakni dilaksanakan oleh polisi negara RI sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 KUHP.

4.2.1 Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Investasi Emas Di Polresta Surakarta

Polisi berhasil mengungkap kasus tersebut setelah ada laporan korban para nabasah yang telah menyetorkan uangnya kepada pelaku, dan dijanjikan akan dikembalikan pada enam bulan ke depan. Polres Surakarta dalam memelihara keamanan adalah hal yang harus ada demi terciptanya keamanan di lingkungan masyarakat. (1) Polres Surakarta belum mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Surakarta. (2) Perlengkapan dan peralatan yang dimiliki Polres Surakarta belum cukup untuk menjaga keamanan di Surakarta. (3) Terbatasnya Jumlah Petugas Kepolisian Polres Surakarta. Delik yang dirumuskan secara materiil atau delik yang dikualifisir akibatnya perlu dicari hubungan kausal antara fakta-fakta yang telah dikumpulkan dengan akibat yang terjadi.

4.3.1 Penipuan Investasi Emas Ditinjau Dari Hukum Islam

Sebenarnya dalam Islam telah diatur sedemikian rupa tentang investas hal ini berdasarkan firman Allah swt.: *“Supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian”*. (QS. al-Hasyr [59]: 7). Oleh sebab itu dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi adalah Al-Qur’an dan hadis Nabi saw. Selain itu, karena investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi (muamalah māliyah), sehingga berlaku kaidah fikih, muamalah, yaitu “pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000).

4.2 Saran

Untuk pihak Kepolisian Surakarta, diharapkan kedepannya mencipatkana divisi yang mampu melakukan analisis terhadap tindak pidana bisnis atau bekerja sama dengan ahli ekonomi dalam melakukan proses pembuktian tindak

pidana terkait investasi sehingga masalah hukum pidana dalam ranah bisnis dapat terselesaikan.

Untuk pelaku bisnis, diharapkan kedepannya memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait bisnis yang dijalankan secara transparan dan akuntabilitas sehingga tidak merugikan masyarakat.

Untuk masyarakat, diharapkan kedepannya lebih berhati-hati kepada bisnis investasi sehingga tidak dirugikan. Langkah yang dapat diambil adalah membaca produk daripada bisnis investasi atau melakukan konsultasi investasi pada ahlinya.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Al Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*, Surabaya: Al-Hidayah, tt.: 2/111

Darmadi, Sugianto, 1998, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Bandung: Bandar Maju

Hakim, Abdul, 2003, *Analisis Investasi*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Melisa M, "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online," *Jurnal Lex Crimen*, Vol.II. No.4, (Agustus, 2013)

PAF Lamintang, 1997, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Prasetyo, Rizki Dwi, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia," *Jurnal Artikel Ilmiah*, (2014), Fakultas Hukum: Universitas Brawijaya

Setianto, Widodo Arrys dan Endah W, Sri, "Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong (Studi Kasus Pidana Penipuan dengan Menggunakan Cek Kosong di Pengadilan Negeri Semarang)," *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No.2, (Juni, 2017)

Suratman dan Philips, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta

Kompas.com, Kamis 6 Juli 2017 15:20 WIB, *Polisi Solo Bongkar Penipuan Berkedok Investasi Emas, 2 Orang Ditahan*, dalam <http://www.kompas.com> , diunduh Rabu, 11 Oktober 2017, pukul 10:10